

# KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA PARIGI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Putri Utami<sup>1</sup>, Agus Nurulsyam S<sup>2</sup>, Neti Sunarti<sup>3</sup>  
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
e-mail: putriu147@gmail.com

## ABSTRAK

*Permasalahan penelitian ini adalah kurang efektifnya pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa, yang ditunjukkan dengan rendahnya ketepatan dalam memberikan pelayanan yang disebabkan karena kurangnya komunikasi perangkat desa dengan masyarakat. Rendahnya sikap kerjasama dan saling bantu antar perangkat Desa. Masih rendahnya komitmen perangkat desa dalam memenuhi harapan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 12 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada umumnya belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa berupa kurangnya kedisiplinan dalam mematuhi aturan tata tertib, kesibukan masing-masing unsur dalam melaksanakan tugasnya dan adanya sikap lebih mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah desa yaitu dengan diberikannya arahan dan penjelasan serta bimbingan pada seluruh unsur pemerintah desa dan mengajak untuk selalu memiliki dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan memberikan pemahaman dan penjelasan serta mengajak seluruh unsur untuk dapat bekerjasama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Koordinasi, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik.*

## PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa, seluruh perangkat desa mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik demi terwujudnya kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Peran pemerintah desa dalam melaksanakan wewenangnya menjadi tolak ukur yang menunjukkan sejauh mana kualitas pelayanan yang mereka berikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pencapaian kualitas pelayanan publik tidak lepas dari faktor sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (SDM) sering merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Untuk mewujudkan kinerja optimal Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan publik maka harus didukung dengan adanya sumberdaya manusia aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang memadai.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan disini berarti bahwa dalam melaksanakan

tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa dan LPM harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan semua aparatur pemerintah Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel kepada masyarakat.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi hal seperti ini, kepala desa harus terjun langsung dan mengatasi semua persoalan yang ada dalam lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, khususnya yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak lanjutnya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintahan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional pemerintah desa. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa mempunyai peran dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik.

#### Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik dengan semua pihak. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam

pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa Di Kabupaten Pangandaran bahwa Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pelayanan.

Pemerintah Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam menangani pelayanan publik belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan persyaratan pengantar nikah, permohonan pembuatan KK, persyaratan akta, persyaratan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan lain sebagainya. Selain itu pelayanan yang diberikan pemerintah desa masih kurang memiliki disiplin kerja, hal tersebut terlihat kantor desa masih lengang dipagi hari, masih untung

kalau kita dapati satu atau dua orang, bahkan tidak ada sama sekali pintu masih tertutup, padahal jam kerja sudah dimulai. Aparatur desa akan mulai berdatangan baru sekitar pukul 08.30 pagi. Sehingga terkadang masyarakat yang membutuhkan pelayanan lalu datang dipagi hari, mereka harus bersabar menunggu untuk dilayani hingga pukul 08.30 pagi.

Pelayanan administrasi yang diberikan masih terkendala oleh kecepatan waktu aparatur Desa dikarenakan beberapa oknum aparatur desa sering membolos pada saat-saat jam kerja. Terjadi keluhan dari masyarakat desa mengenai pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, hal itu dikarenakan aparatur desa atau staf yang berwenang dalam mengurus administrasi masyarakat seperti registrasi kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan surat keterangan tidak ada ditempat pada saat jam kerja.

Belum optimalnya pelayanan publik Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran disebabkan kurangnya koordinasi antar perangkat desa dan kepala desa, kurangnya komunikasi secara horizontal antar perangkat desa karena tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang mencakup pelayanan kepada masyarakat dan komunikasi vertikal kepada masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan sikap dalam menjalankan pemerintahan.

Selain itu kurangnya komunikasi antara aparat desa dengan BPD menyebabkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi, Anggota BPD jarang ke kantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang.

Berdasarkan hasil peninjauan awal yang penulis lakukan di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya koordinasi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, hal ini dibuktikan dengan indikator-indikator permasalahan sebagai berikut.

1. Kurang efektifnya pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa, yang ditunjukkan dengan rendahnya ketepatan dalam memberikan pelayanan yang disebabkan karena kurangnya komunikasi perangkat desa dengan masyarakat. Contoh, masih adanya masyarakat yang mengeluh karena data yang tertera dalam dokumen Kartu Keluarga ataupun KTP masih adanya kesalahan dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.
2. Rendahnya sikap kerjasama dan saling bantu antar perangkat Desa. Contoh perangkat desa dalam bekerja ketika menghadapi kesulitan tidak dibantu oleh rekan kerjanya sehingga terkadang meninggalkan tugas tanpa menyelesaikannya terlebih dahulu.
3. Masih rendahnya komitmen perangkat desa dalam memenuhi harapan masyarakat. Contoh,

kurangnya kedisiplinan dalam mematuhi aturan tata tertib yang ditetapkan seperti terlambatnya perangkat desa datang ke kantor yang seharusnya datang pukul 08.00, sehingga terkadang masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus bersabar menunggu untuk dilayani hingga pukul 09.00 pagi, sehingga penyelesaiannya menjadi terlambat.

Berdasarkan hasil observasi dan permasalahan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”.”.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja

Ndraha, (2013: 290) menyatakan bahwa :

Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan- kegiatan

yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut Hasibuan (2011:88), menyatakan bahwa koordinasi dapat terlaksana dengan baik apabila memenuhi syarat-syarat koordinasi sebagai berikut :

1. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama)
2. *Rivalry* (Persaingan dalam organisasi)
3. *Team spirit* (saling menghargai)
4. *Esprit the corps* (semangat tim)

### 2. Pengertian Pelayanan Publik

Mulyadi (2015:188-189) menyatakan bahwa:

Pelayanan Publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, negara didirikan oleh pelayanan publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pada hahikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal ini karena

masalah yang diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya deskriptif. Karena penelitian ini mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu reduksi data penyajian data keabsahan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Sense Of Cooperation* (Perasaan Untuk Bekerjasama)**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama) bahwa kesepakatan semua unsur pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan optimal seperti unsur aparatur desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat telah menjalin kesepakatan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik. Pelayanan pada masyarakat di desa merupakan tanggung jawab bersama unsur-unsur yang terdapat di desa. Unsur-unsur pemerintah desa dapat menjalin hubungan dan komunikasi agar ada kesepakatan semua unsur sehingga dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-

masing. Namun untuk komitmen dari semua unsur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal kurangnya kedisiplinan dalam mematuhi aturan tata tertib yang ditetapkan. Dalam menjalin suatu hubungan akan selalu membutuhkan sebuah komitmen. Tanpa adanya komitmen, hubungan mungkin tidak bisa berjalan dengan harmonis, karena akan sulit memahami perbedaan sudut pandang. Komitmen juga dibutuhkan dalam hubungan kerja dan lain sebagainya. Selanjutnya kerjasama yang dilakukan semua unsur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang optimal seperti kurangnya saling bantu antar perangkat desa ketika ada yang mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanannya pada masyarakat. Oleh karena itu seluruh unsur pemerintah desa dapat bekerjasama dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Dengan demikian uraian di atas kurang sejalan dengan pendapat Suganda (2011:212) yang menyatakan bahwa :

Dalam melakukan koordinasi, diperlukan adanya kerjasama antar anggota yang pada akhirnya menimbulkan keharmonisan kerja sehingga tidak adanya pekerjaan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain dan semua usaha dan

kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan teori di atas bahwa kelancaran suatu koordinasi ditentukan oleh adanya perasaan dalam bentuk kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antar instansi, adanya komunikasi yang efektif, tujuan kerjasamanya dan peranan dari tiap pihak yang terlibat, harus dapat menciptakan organisasinya sendiri sedemikian rupa sehingga menjadi suatu organisasi yang mampu memimpin organisasi-organisasi lainnya, meminta ketaatan, kesetiaan, dan disiplin kerja tiap pihak yang terlibat, terciptanya koordinasi di dalam suatu organisasi akan menunjukkan bahwa organisasi tersebut benar-benar bergerak sebagai suatu sistem, dan pemimpin akan bertindak sebagai fasilitator dan tenaga pendorong.

## **2. *Rivalry* (Persaingan dalam Organisasi)**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *rivalry* (persaingan dalam organisasi) bahwa keterlibatan semua unsur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal seperti adanya salah satu unsur yang kurang aktif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Keterlibatan sebagai niat atau bagian motivasional yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu, dan ditujukan melalui ciri

penampilan. Dengan demikian keterlibatan unsur-unsur pemerintah desa begitu penting agar keinginan masyarakat yang terhadap disposisi pelayanan yang diberikan. Kemudian kerjasama dan saling bantu satu sama lain telah dilaksanakan dengan optimal seperti dengan adanya komunikasi dari beberapa unsur pemerintahan desa mengenai masyarakat yang membutuhkan layanan dari pemerintah desa. Kerjasama dan saling bantu berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya semua unsur pemerintah desa berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat telah optimal seperti seluruh unsur yang ada di pemerintah desa saling mengedepankan kepentingan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat seluruh unsur pemerintah desa berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Ndraha (2013:295), menyatakan yang menyatakan bahwa : Pelaksanaan koordinasi dilakukan untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang

mengikat semua pihak yang bersangkutan

Dengan demikian pelaksanaan koordinasi merupakan proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

### **3. *Team Spirit* (Saling Menghargai)**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *team spirit* (saling menghargai) bahwa semua unsur pemerintah desa telah dapat saling menghargai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan optimal seperti dalam melaksanakan tugas-tugasnya seluruh unsur-unsur tersebut berbeda-beda dapat saling menghormati dan menghargai kewenangan yang ada. Dengan demikian apabila unsur pemerintah desa mau menerapkan sikap saling menghargai maka akan terjalin suasana kerukunan dan kenyamanan sehingga dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan optimal. Kemudian pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa telah optimal seperti perangkat desa telah memiliki pemahaman tugas pokok dan

fungsinya masing-masing sehingga dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat mengikuti jenis layanan yang dibutuhkan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi

Selanjutnya semua unsur pemerintah desa saling berkomunikasi dengan santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara optimal. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para perangkat desa apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar

Hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat Handayani (2013:118-119), yang menjelaskan bahwa salah satu hakikat koordinasi yaitu sebagai berikut:

Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interdependensi inilah yang

mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Dengan demikian hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan koordinasi

#### **4. *Esprit the corps* (Semangat Tim)**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *esprit the corps* (semangat tim) bahwa semua unsur pemerintah desa saling mendukung terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat secara efektif telah dilaksanakan kurang optimal seperti masih adanya masyarakat yang mengeluh dan kecewa lantaran pelayanan yang diberikan ada yang mengalami keterlambatan. Dalam pelayanan kepada masyarakat unsur-unsur pemerintah desa agar menjadi rekan kerja yang baik dan dapat saling mendukung satu sama lain, hasil yang dicapai bukanlah hasil secara individu tetapi hasil kekompakan bersama dalam bekerja. Kemudian komitmen perangkat desa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kurang optimal kurangnya kedisiplinan dalam mematuhi aturan tata tertib yang ditetapkan. Komitmen merupakan sikap kerja yang penting karena perangkat desa yang memiliki komitmen diharapkan bisa menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan pemerintah desa dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di organisasi pemerintahan desa.

Selanjutnya semua unsur pemerintah desa saling membantu memecahkan permasalahan dalam melayani masyarakat telah dilaksanakan dengan optimal seperti dengan adanya komunikasi dari beberapa unsur pemerintahan desa mengenai masyarakat yang membutuhkan layanan dari pemerintah desa. Bagi pemerintah desa memiliki perangkat desa yang dapat membantu dalam memecahkan berbagai permasalahan yang tidak dapat diatasi secara mandiri merupakan hal yang sangat diinginkan, organisasi pemerintah desa memiliki perangkat desa banyak dapat menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesamanya, sehingga di antaranya akan saling membantu, dan ini membutuhkan kecerdasan emosional dan sosial.

Hasil penelitian di atas kurang sesuai dengan pendapat Sugandha (2011:97) yang menyatakan bahwa : Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Dengan demikian koordinasi dilakukan untuk mencapai tujuan bersama sehingga kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja, dan saling saling mendukung terlaksananya

koordinasi secara efektif sehingga melalui koordinasi yang baik maka akan meningkatkan semangat kerja dan dapat saling membantu memecahkan permasalahan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada umumnya belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator permasalahan sebagai berikut: rendahnya komitmen dari semua unsur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kurangnya kerjasama yang dilakukan semua unsur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kurangnya keterlibatan semua unsur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan belum semua unsur pemerintah desa saling mendukung terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat secara efektif.

Adapun hambatan-hambatan pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut: kurangnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kurangnya kedisiplinan dalam mematuhi aturan tata tertib, kesibukan masing-masing unsur dalam melaksanakan tugasnya dan adanya sikap lebih mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah desa yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam melaksanakan tugasnya, penjelasan serta bimbingan pada seluruh unsur pemerintah desa, mengajak semua unsur pemerintah desa untuk dapat bekerjasama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, meminta seluruh unsur pemerintah desa untuk ikut serta dengan melibatkan diri dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan diberikannya pembinaan secara rutin serta meminta seluruh unsur pemerintah desa bersikap untuk mengedepankan kepentingan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku :**

- Handyaningrat, Soewarno. 2013. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa Di Kabupaten Pangandaran